

**ANALISIS ALOKASI BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL
DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA
BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Indah Agustina

NIM : 222018208

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

SKRIPSI

**ANALISIS ALOKASI BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL
DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA
BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi pada
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Indah Agustina

NIM : 222018208

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Agustina

NIM : 222018208

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dalam
Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Palembang, Februari 2022



Indah Agustina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam
Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Pada
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Indah Agustina
NIM : 222018208
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing I

Welly, S.E., M.Si
NIDN: 0212128102

Pembimbing II

Agrelia Afrida, S.E., M.Si
NID : 021808403

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E., M.Si., CA
NIDN: 0216106902

MOTTO :

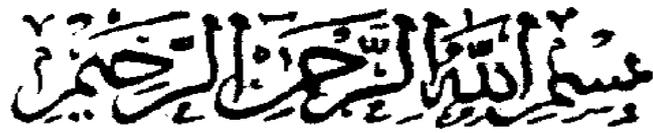
**“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun,
selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk
memaksimalkan kemampuan yang ia miliki”.**

(Indah Agustian)

Dengan do'a yang telah diberikan,

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Bapakku (Rusdiyanto) dan Ibu
(Ny. Patima)**
- ❖ Ayukku Tersayang (Siska Widiawati)**
- ❖ Kakakku tersayang (Dona Rusdiansya)**
- ❖ Keluarga Besar tersayang**
- ❖ Sahabat Terbaikku**
- ❖ Dosen Pembimbingku**
- ❖ Almamaterku**



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis junjungkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih maupun Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan” telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dapat diatasi. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada orang tua penulis yang selalu mengirimkan doa, dukungan, semangat, nasihat dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing I Ibu Welly, S.E.,M.Si dan

Pembimbing II Ibu Anggrelia Afrida, S.E.,M.Si yang telah sabar, tekun dan tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dan saran-saran yang membangun serta sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak, Ibu dan seluruh staf pengajar, serta karyawan dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,Ak., CA selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak/Ibu pimpinan yang telah memberikan izin penelitian pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sahabat-sahabatku yang terbaik, teman terbaikku, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya.

Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian

semua mendapat balasan-Nya. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, Februari 2022

Penulis

(Indah Agustina)

DAFTAR ISI

HAIPLAMAN SAMPUL DEPAN	i
HMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
Kajian Pustaka	14
a. Landasan Teori	14

1) Teori Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	14
2) Belanja Operasi.....	16
3) Belanja Modal.....	18
4) Indeks Pembangunan Manusia	22
b. Penelitian Sebelumnya.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Operasional Variabel.....	31
D. Data yang Diperlukan.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Analisis dan Teknik Analisis.....	34
1. Analisis Data.....	34
2. Teknik Analisis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum BPKAD Provinsi Sumsel.....	37
2. Visi dan Misi	42
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	43
a. Struktur Ogranisasi	43
b. Pembagian Tugas	44

B. Pembahasan dan Hasil.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I. 1 Laporan Realisasi dan Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020.....	8
2. Tabel I. 2 Laporan Realisasi dan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020.....	10
3. Tebal II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	28
4. Tabel III.1Operasional Variabel	31
5. Tabel IV.1 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2020	49
6. Tabel IV. 2 Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	51
7. Tabel IV.3 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	53
8. Tabel IV.3 4 Anggaran Belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	57
9. Tabel IV.5 Belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Sumatera Selatan	40
Gambar 2 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran dan Belana Operasi pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran dan Belana Modal pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2020

Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Riset dari Tepat Penelitian

Lampiran 5 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Qur'an

Lampiran 6 Sertifikat SPSS

Lampiran 7 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer

Lampiran 8 Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 9 Sertifikat Workshop

Lampiran 10 Abstract

Lampiran 11 Biodata Penulis

ABSTRAK

Indah Agustina /222018208/ 2018/ Analisis Analisis Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis alokasi belanja operasional dan belanja modal dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Alokasi Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2016-2020 di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja operasional ke belanja bantuan sosial berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan belanja modal pada belanja aset tetap lainnya yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

Indah Agustina /222018208/2018/ Analysis of Operational Expenditure Analysis and Capital Expenditure in Improving the Human Development Index at BPKAD South Sumatra Province.

The formulation of the problem in this research is How to Analyze Operational Expenditure Allocation and Capital Expenditure in Improving Human Development Index at BPKAD South Sumatra Province. The purpose of this study was to determine the Analysis of Operational Expenditure Allocation and Capital Expenditure in Increasing the Human Development Index at BPKAD South Sumatra Province. The type of research used is descriptive research. The data used is secondary data from 2016-2020 in the province of South Sumatra. The results of this study indicate that the allocation of operating expenditures has an impact on increasing the Human Development Index and capital expenditures has an impact on the Human Development Index.

Keywords: Allocation of Operational Expenditure and Capital Expenditure in Improving Human Development Index

Nama	NIM	Keterangan
Indah Agustina	222018208	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi keuangan publik yang di pusatkan pada pemerintah daerah. Dalam era globalisasi sekarang ini menerapkan otonomi daerah seutuhnya membawah konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang sehat. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi sendiri dan tugas pembantu. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Belanja dikelompokan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga (PSAP 02 PP 71 Tahun 2010). Berdasarkan pasal 55 Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial(Erlina,2015). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. belanja modal merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan yang tertuang dalam kinerja keuangan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang rencanakan, maka belanja modal yang dilakukan terlaksana denganbaik (Bastian,2016).

Indeks Pembangunan Manusia diciptakan dan dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 dan seri laporan tahunan yang diberi judul "*Human Development Report*" (UNDP,1990:1).Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya merupakan hakikat dari pembangunan nasional. Pernyataan tersebut menandakan bahwa manusia merupakan sentral dari suatu prose pembangunan(Adiputra,2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) (2015) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia(IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan suatu daerah atau wilayah ke dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu bidang sosio-ekonomiyang mengacu pada hasil pembangunan manusia, diantaranya bidang kesehatan yang diukur dengan tingkat harapan hidup, bidang pengetahuan/pendidikan diukur dengan tingkat kemampuan baca tulis

orang dewasa dan rata-rata lama sekolah, dan bidang kemampuannya beli (standar hidup layak) yang diukur dengan GDP per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia diciptakan dan dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia pada risiko fisikal APBD Berbasis Indeks Pembangunan Manusia istilah risiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan kejadian yang dapat mengancam penapaian tujuan dan sasaran organisasi. Terhubung juga dengan potensi kerugian yang tidak diinginkan atau minimal menunjukkan adanya ketidakpastian. Risiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, dan reputasi dari institusi yang bersangkutan dengan penyebab berbagai faktor, antara lain kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi.

Setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, sangat rentan terhadap risiko. Suatu risiko yang terjadi dapat bersifat *single*, *multiple* ataupun serial. Risiko rendah kinerja suatu instansi berasal dari rendahnya mutu pelayanan publik, misalnya misi dan tujuan dari instansi tersebut sekaligus munculnya ketidakpercayaan publik.

Berkenaan dengan sektor publik yang menuntut transparansi dan peningkatan kinerja dengan dana yang terbatas, risiko yang dihadapi instansi pemerintah akan semakin bertambah dan meningkat kedepannya. Sektor publik ini menyakut seluru entitas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Bagi pemda, bentuk risiko juga bermacam macam, termasuk risiko fisikal terkait alokasi APBD. Apalagi melihat volatilitas kondisi makro ekonomi daerah, inflasi daerah yang dijadikan dasar asumsi di dalam penyusunan APBD, setiap pergesaran yang terjadi dapat meningkatkan tensi risiko APBD.

Faktor lainnya yang dapat dijadikan sumber risiko bagi pemda adalah dengan upaya pemenuhan komitmen peningkatan status kualitas manusia di daerah dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Formula IPM terdiri atas aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang layak. Setiap persen kenaikan angka IPM yang dikehendaki oleh pemda tentu saja membawa implikasi anggaran yang cukup signifikan.

Kondisi ini tentu membutuhkan analisis mendalam bagaimana seorang pemimpin di daerah wajib menganalisis tingkat kepekaan dari masing-masing komponen pembentuk IPM. Dengan demikian keputusan mengalokasi anggaran di masing- masing komponen manjadi krusial.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada Januari–Agustus 2021, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD mencapai 53,7 persen dari target. Adapun, realisasi belanja APBD hingga Agustus 2021 tercatat 44,2 persen dari target, atau terdapat selisih sekitar 9,5 persen dengan pendapatan. Terlihat ada daerah yang jumlah realisasi pendapatan dan

belanjanya mendekati, ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar tapi belanjanya masih jauh lebih rendah. Mayoritas [provinsi] jumlah belanjanya lebih rendah

Kementerian Keuangan pun mencatat bahwa masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional tiga bulan ke depan. Selisih tertinggi dicatatkan oleh Jawa Timur (Rp9,9 triliun), Aceh (Rp4,3 triliun), dan Jawa Tengah (Rp4,2 triliun).Pemanfaatan kas di daerah perlu lebih optimal. <https://m.bisnis.com>

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar semua kegiatan yang menyangkut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri maka Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Akuntansi Keberhasilan suatu daerah tidak lepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel I.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi pada pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	3.650.152.269.188,71	3.486.550.394.731,75
2017	4.631.666.652.296,00	4.410.377.592.244,00
2018	5.730.234.643.508,00	5.226.350.947.402,94
2019	5.248.661.128.363,95	4.812.470.138.975,13
2020	5.387.261.671.082,86	5.038.670.309.775,65

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2021

Tabel 1.1 di atas bila dilihat pada Laporan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 dana bantuan sosial yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi belanja operasi pada tahun 2016 pada belanja bantuan sosial realisasinya sesuai atau *balance* anggaran sebesar Rp 226.252.000,00 dan realisasinya sebesar Rp226.252.000,00 pengeluaran sesuai dengan anggaran. Pada tahun pada tahun 2017 pada belanja bantuan realisasinya hanya sebesar Rp 200.000.000,00 padahal anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 600.000.000,00 pada tahun 2017 untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat belanja bantuan sosial dalam hal kesehatan hanya 33% dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia pada belanja bantuan sosial pada tingkat kesehatan.

Pada tahun 2018 justru tidak dianggarkan sama sekali padahal bantuan belanja sosial dalam hal kesehatan untuk Indeks Pembangunan Manusia itu sangat diperlukan karna tidak dianggarkan pemerintah sudah mengeluarkan

pada belanja belanja pegawai pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah ada juga dianggarkan dari belanja tak terduga. Pada tahun 2019 juga tidak dianggarkan sama sekali padahal belanja bantuan sosial dalam hal kesehatan untuk Indeks Pembangunan karna tidak dianggarkan pemerintah sudah mengeluarkan pada belanja belanja pegawai pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah ada juga dianggarkan dari belanja tak terduga.

Pada tahun 2020 anggaran juga tidak ada anggaran sama sekali padahal belanja bantuan sosial dalam hal kesehatan untuk Indeks Pembangunan Manusia itu sangat penting, karena pada tahun 2020 di Indonesia mengalami pandemi Covid-19 bahkan bukan cuma Indonesia masih mengalami pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran pada belanja bantuan sosial dalam hal kesehatan untuk Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 karna tidak dianggarkan pemerintah sudah mengeluarkan pada belanja belanja pegawai pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah ada juga dianggarkan dari belanja tak terduga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

Jumlah realisasi belanja daerah tidak dapat menjelaskan seberapa efektif dan efisien pengeluaran yang dihabiskan yang artinya realisasi belanja daerah yang tinggi tidak selalu berarti bahwa pengeluaran tersebut efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah realisasi belanja operasi dan belanja modal tidak menentukan capaian IPM. Karan untung mencapai tinggi rendah IPM itu bukan dari belanja operasi dan belanja modal saja dapat dialokasikan dari belanja tak terduga, transfer dan transfer bantuan keuangan

Penentuan capaian IPM dapat dilihat melalui apakah belanja operasi dan belanja modal sudah dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan komponen dalam penghitungan IPM sehingga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pahlevi, 2017).

Belanja operasi dalam peningkatan IPM dapat dilihat pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013, minimal persentase yang dicapai untuk anggaran pendidikan dari total belanja daerah sebesar 20 persen. Sedangkan, persentase anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD (UU Nomor 36 Tahun 2009). Belanja operasi yang dialokasikan tepat sasaran untuk peningkatan AHH, RLS, HLS, dan pendapatan perkapita tentu akan berpengaruh pada IPM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sasana (2012) serta Dewi dan Supadmi (2016) bahwa belanja operasi berpengaruh pada IPM. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian Deswanto dkk. (2017) bahwa belanja pegawai dan belanja hibah yang termasuk dalam belanja operasi tidak berpengaruh pada IPM.

Belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan aset daerah sebagai investasi (Hukom, 2015). Laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel I.2
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	846.142.303.821,20	607.740.926.745,28
2017	1.806.367.818.574,00	1.377.382.678.423,69
2018	1.690.535.413.549,95	1.537.275.105.768,15
2019	1.820.168.210.865,27	1.606.219.507.432,26
2020	2.300.677.274.954,52	1.664.700.767.363,54

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2021

Table 1.2 diatas bila dilihat pada Laporan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 dana belanja modal aset tetap lainnya dalam hal pendidikan yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2016 realisasinya sebesar Rp2.216.516.800,00 dan anggaran sebesar Rp 2.694.592.200,00 untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya dalam hal pendidikan itu hanya 82%. Pada tahun 2017 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya sebesar Rp 54.827.304.957,00 dan anggaran sebesar Rp 54.844.627.907,00 realisasi yang dikeluarkan hampir habis dari apa yang di anggaran oleh pemerintah untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya dalam hal pendidikan sebesar 99%.

Pada tahun 2018 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya sebesar Rp 64.552.072.000,00 dan anggaran sebesar Rp 64.145.081.628,00 realisasi yang dikeluarkan hampir habis dari apa yang di anggaran oleh pemerintah untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya dalam hal pendidikan hampir mencapai 100%. Pada

tahun 2019 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya sebesar Rp8.207.828.450,00 padahal anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp34.538.330.000,00 sehingga pada tahun 2019 untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya dalam hal pendidikan sangat rendah hanya 23% saja karna pada belanja operasi anggaran untuk aset tetap lainnya sudah dikeluarkan pada belanja tanah, belanja peralatan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset lainnya, belanja BOS dan belanja BLUD dan belanja tak terduga sehingga bagi pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp34.538.330.000,00 dan terealisasi hanya sebesar Rp8.207.828.450,00 dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia pada aset tetap lainnya dalam hal pendidikan pemerintah daerah mengacu pada belanja buku dan kepustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan dan aset tetap lainnya dalam tingkat pendidikan.

Pada tahun 2020 pada belanja modal aset tetap lainnya realisasinya sebesar Rp53.768.783.085,00 padahal anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 90.534,093.767,00 sehingga pada tahun 2020 untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan lewat belanja aset tetap lainnya dalam hal pendidikan terbilang cukup rendah hanya 59% saja karna pada belanja operasi anggaran untuk aset tetap lainnya sudah dikeluarkan pada belanja tanah, belanja peralatan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset lainnya, belanja BOS dan belanja BLUD dan belanja tak terduga sehingga bagi pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp293.649.013.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 215.967.588.496,51 dilihat

dari indikator Indeks Pembangunan Manusia pada aset tetap lainnya pemerintah daerah mengacu pada belanja buku dan keputakaan, barang bercorak kesenian,kebudayaan dan aset tetap lainnya dalam tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penukis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul”**Analisis Alokasi Belanja Operasidan Belanja Modal dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Analisis Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Analisis Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik (ASP), penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai alokasi belanja modal dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah khususnya mengenai alokasi belanja modal dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani Paramita, 2020. Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar.
- Eman, dkk 2021. Perekonomian Indonesia (Suatu Tinjauan Konseptual). Penerbit Media Sains Indonesia. Melong Asih Regency B40- Cijerah Kota Bandung-Jawa Barat.
- Hukom. 2015. *Effect Of Capital Expenditures, Economic Growth And Poperty On Human Deveplement In Central Kalimantan. IOST Jurnal OF Economics and Finance Ver. IV, 6(6), 2321-5933.*
- Mahirsyah Pradana, 2016. Alokasi belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
- Mardianso. 2018. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru), Yogyakarta.
- Mittal. P. 2016. *Social Sector Expenditure and Human Development of Indian States. Expenditure, MPRA Paper No. 75804.*
- Molli Wahyuni, 2020. Statistik deskriptif. Penerbit Bintang Pustaka Madani Yogyakarta.
- Mukarramah, Cindy, Muhammad Zulkarnain, 2019. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.
- Pahlevi, 2017. *Impact of Governance and Government Exvenditure on human Development in Indonesia. Paper Of International Institute of Social Studies, 1-54.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Sandu dan Ali 2015. Dasar Metodologi Penelitian, penerbit Literasi media publishing. Yogyakarta

Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung

Sintong Ariansyah, 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto Di Indonesia.

Sri Rahayu. 2020. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah. Penerbit perspektif (*New International Sociology*).

Sugeng, dkk 2021. Alokasi Belanja Sehat. Penerbit Media Sains Indonesia Jawa Barat.

UNDP.1990, *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah/ 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

UNDP.2010. *Human Development Report 2010*. New York: United Nations Development Programme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kesehatan. 13 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta.

V. Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian. Penerbit PUSTAKA BARU PRESS. Yogyakarta.

Wa Ariadi 2021. Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Analisis. Penerbit Grup penerbitan CV Budi/Utama. Yogyakarta.